



Available online at journal.unhas.ac.id/index.php/HJS

HASANUDDIN JOURNAL OF SOCIOLOGY (HJS)

Volume 7, Issue1, 2025

P-ISSN: 2685-5348, E-ISSN: 2685-4333

HUMANITARIANISME AFEKTIF DIGITAL: STUDI KASUS NASI DARURAT JOGJA SEBAGAI GERAKAN CITIZEN AID SEHARI-HARI

(Digital Affective Humanitarianism: A Case Study of Nasi Darurat Jogja as a Everyday Citizen Aid Movement)

Nabilah Ulfamadani Husain^{1*}, Nursabrina Rahmawati¹, Farihah Nurfaizatush Sholihah¹

¹Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia, Email: nursabrinarahmawati@mail.ugm.ac.id

¹Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia, Email: nabilahulfamadanih@mail.ugm.ac.id

¹Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Indonesia, Email: farihahnurfaizatushsholihah@mail.ugm.ac.id

ARTICLE INFO

How to Cite:

Husain, N. U., Rahmawati, N., & Sholihah, F. N. (2025). Humanitarisme Afektif Digital: Studi Kasus Nasi Darurat Jogja Sebagai Gerakan Citizen AID Sehari-hari. *Hasanuddin Journal Sociology (HJS)*, 7(1), 1-13.

Keywords:

everyday humanitarianism; citizen aid; digital affective; downward accountability; Nasi Darurat Jogja

Kata Kunci:

everyday humanitarianism; citizen aid; afeksi digital; akuntabilitas horizontal; Nasi Darurat Jogja.

ABSTRACT

This study examines the practice of everyday humanitarianism through the case of Nasi Darurat Jogja, a digital-based citizen aid movement in Yogyakarta providing emergency food and essential assistance. Using Lisa Ann Richey's framework of everyday humanitarianism and qualitative methods, three key findings emerge. First, NDJ mobilizes affective-digital solidarity by leveraging social media (X/Instagram) to craft empathetic narratives rooted in the founder's personal experiences, Second, the movement functions as a corrective to rigid formal aid systems, Third, NDJ disrupts conventional humanitarian professionalism through hybrid negotiations: rejecting formal structures (e.g., legal entity) while adopting semi-professionalization (dedicated bank accounts/donation reports) for sustainability; integrating market logic (cross-subsidization via a food stall) without compromising solidarity values; and establishing trust-based accountability through visual social media documentation to replace technical-bureaucratic mechanisms. These findings demonstrate how citizen-led humanitarianism in the Global South redefines humanitarian paradigms via digital affect, operational agility, and creative mediation between moral imperatives and administrative demands, proving local actors' capacity to address everyday inequalities while critiquing the contextual limitations of formal aid systems.

ABSTRAK

Studi ini menganalisis praktik everyday humanitarianism melalui kasus Nasi Darurat Jogja, gerakan citizen aid berbasis digital di Yogyakarta yang menyediakan bantuan pangan dan pokok darurat. Menggunakan kerangka everyday humanitarianism Lisa Ann Richey dan metode kualitatif, penelitian mengungkap tiga temuan utama: (1)

* Corresponding author. Telp.: -

E-mail address: nabilahulfamadanih@mail.ugm.ac.id

Mobilisasi Solidaritas Afektif-Digital: NDJ memanfaatkan media sosial (X/Instagram) untuk membangun narasi empatik berbasis pengalaman pribadi pendiri, (2) Respons atas Kegagalan Sistem Formal: NDJ muncul sebagai koreksi terhadap rigiditas bantuan formal, dan (3) Disrupsi Norma Profesionalisme: NDJ menegosiasikan norma kemanusiaan konvensional dengan: (1) menolak struktur formal (tanpa badan hukum) namun mengadopsi semi-profesionalisasi (rekening khusus/laporan donasi) untuk keberlanjutan; (2) mengintegrasikan logika pasar (warung makan subsidi silang) sebagai strategi keberlanjutan tanpa mengorbankan nilai solidaritas, serta (3) membangun legitimasi berbasis kepercayaan (trust-based accountability) via dokumentasi visual di media sosial, menggantikan akuntabilitas teknis-birokratis. Temuan menunjukkan bahwa humanitarianisme berbasis warga di Global South menggeser paradigma aktor kemanusiaan melalui afeksi digital, fleksibilitas operasional, dan negosiasi kreatif antara nilai solidaritas dengan tuntutan administratif. NDJ membuktikan kapasitas aktor lokal dalam menciptakan alternatif responsif terhadap ketimpangan sehari-hari, sekaligus mengkritik sistem bantuan formal yang tidak kontekstual.

1. PENDAHULUAN

Diskursus mengenai bantuan kemanusiaan mengalami pergeseran yang cukup signifikan dalam membahas model formal yang selama ini terus didominasi oleh lembaga-lembaga internasional yang berbasis di Global North menjadi bentuk-bentuk bantuan informal dan berbasis komunitas. Pergeseran ini dapat dilihat dengan munculnya praktik-praktik *everyday humanitarianism* yang menggambarkan aksi kemanusiaan sehari-hari oleh warga biasa dalam merespon kebutuhan sosial di sekitarnya, terutama di wilayah Global South yang di banyak wilayah masyarakatnya masih berada dalam kondisi kekurangan, krisis, atau minim dukungan dari aktor formal (Richey, 2018).

Sejarah menunjukkan bahwa sistem bantuan formal berkembang dalam konteks perang dan bencana dengan struktur yang terorganisasi secara hierarkis dan lekat dengan nilai-nilai universal seperti netralitas, independensi, dan imparsialitas. Organisasi seperti Palang Merah, Médecins Sans Frontières (MSF), dan badan-badan PBB seperti OCHA atau WFP merepresentasikan model tersebut. Namun, bantuan formal ini sering mendapatkan kritik karena bersifat terlalu birokratis, tidak responsif terhadap konsep lokal, dan bahkan mereproduksi relasi kuasa kolonial, di mana negara-negara Global North menjadi penyelamat sementara negara-negara Global South yang diposisikan sebagai objek penderitaan (Barnett, 2011; Fassin, 2012).

Berdasarkan penjelasan tersebut, *everyday humanitarianism* muncul sebagai bentuk respon alternatif. Gerakan ini lahir dari keprihatinan warga lokal terhadap penderitaan yang mereka saksikan di sekitar mereka dan diwujudkan melalui tindakan-tindakan langsung yang praktis, seperti berbagi makanan, menyediakan tempat tinggal sementara, hingga membantu korban bencana. Tidak seperti lembaga internasional, pelaku *everyday humanitarianism* seringkali mengalami kendala dalam memperoleh dana, tetapi mereka memiliki pengetahuan kontekstual, jaringan sosial lokal, serta kedekatan emosional dengan masyarakat (Fechter &

Schwittay, 2019).

Fenomena ini terus berkembang di Global South, di mana masyarakat sering menghadapi tantangan struktural seperti kemiskinan, ketimpangan akses, konflik berkepanjangan, dan kegagalan negara dalam memberikan perlindungan sosial. Di banyak kasus, masyarakat lokal justru menjadi aktor utama dalam merespons krisis, jauh lebih responsif daripada bantuan formal. Contohnya dapat ditemukan di berbagai konteks seperti inisiatif warga di wilayah bencana di Filipina, solidaritas komunitas pengungsi internal di Nigeria, hingga gerakan distribusi makanan di Indonesia.

Di Indonesia, praktik *everyday humanitarianism* tercermin dalam inisiatif Nasi Darurat Jogja. Meskipun belum banyak dikaji secara akademik, gerakan ini merepresentasikan pola *citizen aid*, yaitu aksi-aksi bantuan yang dilakukan oleh warga negara biasa secara spontan dan kolektif (Wall & Chroust, 2020). Gerakan ini berawal dari keprihatinan atas kondisi masyarakat di mana ada banyak kasus anak kos atau mahasiswa rantau yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan makannya dalam periode singkat. Fenomena ini terjadi karena tidak adanya *safety net* untuk mereka sehingga inisiator memutuskan untuk memberikan bantuan seadanya yang kemudian berkembang menjadi tindakan kolektif di mana para donatur yang juga merupakan rakyat biasa ikut terlibat. Mereka menyediakan makanan gratis kepada siapa pun yang membutuhkan. Bentuk relasi antara pemberi dan penerima bantuan dalam gerakan ini juga cenderung lebih setara karena sama-sama berasal dari komunitas lokal.

Keunikan dari *everyday humanitarianism* ada pada sifatnya yang informal, adaptif, dan terhubung dengan nilai-nilai solidaritas lokal. Ia tidak selalu tunduk pada protokol formal sehingga efektif karena mampu merespons kebutuhan secara cepat dan fleksibel. Praktik seperti ini menjadi penting terutama ketika sistem bantuan formal tidak dapat menjangkau kelompok rentan secara merata. Di kasus-kasus tertentu, warga lokal bahkan lebih dipercaya oleh masyarakat dibandingkan dengan lembaga-lembaga besar yang dianggap asing (Brković, 2016).

Meskipun demikian, *everyday humanitarianism* pun menemui beberapa tantangan. Kurangnya dukungan institusional membuat gerakan ini rentan terhadap masalah sumber daya manusia maupun finansial. Selain itu, pengakuan terhadap kredibilitas dan legalitas mereka juga sangat minim. Di beberapa kasus, pemerintah atau otoritas lokal justru mencurigai aktivitas semacam ini karena dianggap tidak sesuai dengan protokol atau melanggar aturan administratif. Ketegangan ini mencerminkan minimnya harmonisasi antara struktur formal dan inisiatif warga dalam praktik kemanusiaan (Ticktin, 2014).

Namun demikian, keberadaan *everyday humanitarianism* menjadi bukti bahwa warga negara di Global South tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga aktor penting dalam praktik solidaritas dan respon krisis. Mereka memiliki kapasitas untuk mengorganisasi diri, menciptakan jaringan bantuan, dan menyusun solusi berdasarkan realitas sosial yang mereka hadapi. Hal ini juga berarti adanya sikap menantang narasi dominan dalam sistem kemanusiaan global yang selama ini menempatkan Global North sebagai pusat produksi

pengetahuan dan sumber daya kemanusiaan (Slim, 2015).

Di sisi lain, studi-studi tentang *citizen aid* juga menunjukkan bahwa tindakan-tindakan warga biasa ini turut membentuk dinamika etika dan politik dalam praktik kemanusiaan. Mereka tidak hanya melakukan tindakan moral, tetapi juga menyuarakan kritik terhadap ketidakadilan struktural dan ketimpangan sosial skala global. Hal ini juga berarti *everyday humanitarianism* bukan hanya sekedar “menolong”, tetapi juga mempraktikkan bentuk mikro dari resistensi sosial dan politik (Fechter & Schwittay, 2019).

Dengan demikian, penting untuk menempatkan *everyday humanitarianism* sebagai objek kajian serius dalam studi kemanusiaan kontemporer. Pendekatan ini memperluas pemahaman tentang siapa yang dapat menjadi “*humanitarian actor*” dan bagaimana bentuk bantuan dapat dikembangkan secara desentralistik. Kasus seperti Nasi Darurat Jogja menjadi pintu masuk yang sangat relevan untuk memahami bagaimana praktik solidaritas berbasis warga dapat menjadi alternatif sekaligus kritik terhadap sistem bantuan formal yang seringkali tidak kontekstual dan tidak adaptif terhadap kebutuhan lokal. Dunia di mana krisis berulang terus terjadi, bencana alam, pandemi, hingga konflik sosial menjadikan bentuk bantuan lokal sangat penting. Bantuan ini menawarkan model bantuan yang lebih fleksibel, responsif, dan berakar dari komunitas itu sendiri. Karenanya, studi lebih lanjut tentang *everyday humanitarianism* di Global South bukan hanya akan memperkaya teori kemanusiaan, tetapi juga memberi pengakuan terhadap pelaku lokal yang selama ini terpinggirkan dalam diskursus global.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan dua sumber data: primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan seorang pendiri gerakan Nasi Darurat Jogja. Teknik wawancara ini dipilih untuk memberikan fleksibilitas bagi responden dan peneliti dalam mengembangkan pertanyaan serta jawaban lanjutan. Sementara itu, pemilihan narasumber – khususnya inisiator Nasi Darurat Jogja – dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Teknik ini diterapkan karena gerakan Nasi Darurat Jogja dianggap merepresentasikan studi kasus yang diteliti, yaitu gerakan *Citizen Aid*, sehingga memenuhi kriteria sebagai sumber data utama (Babbie, 2008).

Pemilihan Nasi Darurat Jogja sebagai responden penelitian dijustifikasi oleh karakter khasnya yang menyatu dengan jaringan masyarakat dan kemampuan membangun hubungan intrapersonal – faktor kunci yang membedakannya dari organisasi kemanusiaan formal. Sebagai gerakan humanitarian akar rumput, ketahanan operasionalnya bergantung pada ikatan solidaritas nyata dan digital, sekaligus merepresentasikan praktik *everyday humanitarianism* secara autentik. Kelayakannya sebagai studi kasus semakin diperkuat oleh dinamika uniknya: upaya mempertahankan identitas afektif-digital sambil beradaptasi dengan norma kemanusiaan umum, sehingga menjadikannya studi kasus ideal untuk mengeksplorasi

perkembangan signifikan gerakan berbasis warga biasa.

Adapun sumber data sekunder bersumber dari studi pustaka atas literatur akademik terkait *Citizen Aid* dan *Everyday Humanitarianism*, serta narasi digital media sosial gerakan. Peneliti mengkategorisasikan literatur akademik dan narasi digital media sosial berdasarkan tiga tema utama: (1) motivasi dan legitimasi *citizen aid*, (2) afeksi dan mediasi digital dalam kerja kemanusiaan, dan (3) tantangan keberlanjutan dan koordinasi dengan lembaga formal. Pengelompokan hasil temuan ini bertujuan untuk mengarahkan fokus pembahasan, temuan, dan analisis, sehingga memunculkan kesenjangan penelitian (*research gap*).

Tahapan penelitian dimulai dari identifikasi informan, dengan menentukan figur kunci yang relevan untuk menjadi responden wawancara. Proses ini diikuti dengan koordinasi dan permohonan izin terkait pelaksanaan wawancara. Setelah mendapatkan persetujuan, peneliti terlebih dahulu mengumpulkan data sekunder sementara sebagai landasan pembuatan pertanyaan wawancara, diikuti dengan tahapan wawancara dan proses transkrip hasil wawancara. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan metode triangulasi data: melibatkan penggunaan beragam sumber data untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas hasil temuan (Meydan & Akkaş, 2024; Nightingale, 2019). Dengan demikian, hasil wawancara digunakan untuk mengonfirmasi, mengklarifikasi, dan memperdalam temuan dari data sekunder. Sementara sinkronisasi dengan kerangka konsep *Everyday Humanitarianism* Richey – yang mengkaji profesionalisasi, marketisasi, dan mediatisasi untuk menjelaskan aktivitas humanitarian yang tidak termasuk dalam struktur formal – dilakukan untuk memperkaya interpretasi. Sebelum publikasi, hasil temuan didiseminasikan untuk mendapatkan masukan balik dan melakukan perbaikan laporan.

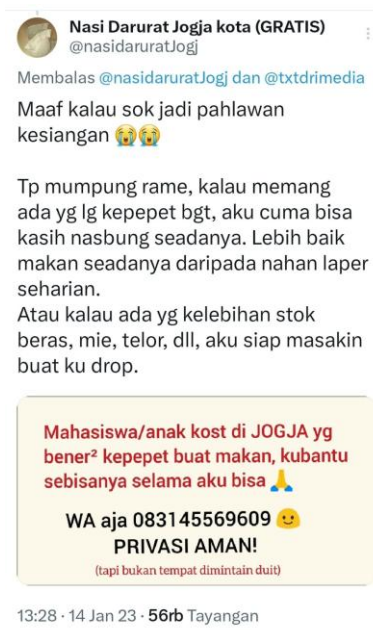
Dalam penelitian ini, posisi peneliti sebagai mahasiswa dinyatakan secara reflektif untuk mengakui dinamika relasi dengan responden. Pendekatan etis berbasis *Ethics of Care* diterapkan, menekankan empati, tanggung jawab, dan penghormatan pada responden sebagai mitra aktif (bukan objek pasif), guna menjaga interaksi yang sensitif dan suportif terhadap kerentanan subjek penelitian.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Mobilisasi Solidaritas melalui Praktik Afektif-Digital

Nasi Darurat Jogja merupakan sebuah gerakan citizen aid dengan konsep *everyday humanitarianism* yang berakar dari platform digital sosial media. Berawal dari komentar ‘salty’ atau sindiran yang dilakukan oleh pendiri Nasi Darurat Jogja terhadap sebuah postingan di platform sosial media X terkait berita kasus meninggalnya mahasiswa Jogja akibat kesulitan biaya, membuat pendiri Nasi Darurat Jogja mendapat banyak tanggapan buruk dari netizen terkait komentarnya tersebut. Dengan menerima komentar-komentar serangan dari netizen itu, pendiri Nasi darurat Jogja yakni Stefano kemudian merasa bersalah dan sadar telah melakukan sesuatu yang tidak berkemanusiaan dengan komentar *salty*-nya. Dari perasaan bersalah tersebut kemudian Stefano mulai merenungkan masa-masa sulit di hidupnya yang mana ia juga pernah merasa kesulitan biaya dan makan. Disinilah rasa empati

tersebut muncul, membuat Stefano tergerak untuk memberikan bantuan makan kepada yang membutuhkan, terutama mahasiswa rantau di Jogja, melalui akun X pribadinya. Awalnya, Stefano hanya ingin menebus kesalahan untuk komentar *salty*-nya dengan melakukan bantuan makan selama 2-3 minggu. Namun, melihat banyaknya mahasiswa yang membutuhkan bantuan pangan, akhirnya Stefano melanjutkan gerakannya dengan tambahan peran sebagai penyalur dana dari donatur yang didapat dari postingannya di X.



Gambar 1. Awal Mula Gerakan Nasi Darurat Jogja di Sosial Media X

Setelah memulai perjalanannya dalam memberikan bantuan pangan kepada para mahasiswa dan anak kost di Jogja, Stefano kemudian memutuskan untuk mengubah akun pribadinya tersebut menjadi akun kolektif dibawah nama Nasi Darurat Jogja dengan nama pengguna *@nasidaruratJogj* pada platform sosial media X dan *@nasidaruratajogja* pada Instagram. Alasan nama tersebut dipilih adalah karena Stefano ingin membantu mereka yang sedang dalam keadaan darurat dalam membutuhkan bantuan pangan, Nasi Gratis dan Nasi Berkah sempat menjadi opsi, tetapi menurut Stefano nama Nasi darurat Jogja lebih dekat dengan niat dan tujuannya dalam memberikan bantuan kemanusiaan. Selain postingan yang menarik perhatian para donatur, pendiri Nasi Darurat Jogja juga mulai memperkuat dan memperluas gerakannya dengan merekrut admin tambahan untuk membantu menggerakkan Nasi darurat Jogja. Pada saat kami melakukan wawancara, total admin yang dimiliki oleh Nasi Darurat Jogja ada sejumlah 6 orang. Tugas dari para-admin ini sendiri selain membantu merespon kebutuhan darurat yang masuk ke akun-akun sosial media, mereka juga membantu mendistribusikan bantuan yang diberikan oleh Nasi Darurat Jogja.

Dalam melakukan distribusi bantuan, sesuai namanya, Nasi Darurat Jogja memberikan bantuan pangan di daerah Yogyakarta. Namun tidak hanya kota, gerakan ini juga membantu permintaan bantuan yang menghubungi sampai pada daerah kabupaten di Yogyakarta seperti Bantul dan Kulonprogo. Para admin yang dimiliki oleh Nasi Darurat Jogja ini juga adalah orang-orang dibalik akun-akun media sosial yang dimiliki oleh Nasi Darurat Jogja, merekalah yang melakukan transparansi kepada masyarakat dengan mengunggah dokumentasi terkait gerakan bantuan yang dilakukan oleh Nasi Darurat Jogja beserta keterangannya. Unggahan yang dibuat oleh Nasi darurat Jogja selalu memiliki keterangan yang positif seperti kata-kata bijak dan menggerakkan empati masyarakat dengan rasa syukur yang diungkapkan melalui bantuan yang mereka berikan. Tentu saja hal tersebut mendapatkan komentar serta *feedback* yang baik dari netizen sosial media. Ada kalanya Nasi Darurat Jogja juga membuat utas dan *story* yang berisi tentang kekhawatiran mereka yang membuahkan komentar negatif, terutama terkait finansial, menilai bahwa Nasi Darurat Jogja tidak profesional dalam menggerakkan bantuan dan mengolah dana dari para donatur.

Dari komentar-komentar serta masukan oleh masyarakat sosial media yang dituju pada Nasi Darurat Jogja tersebut, pendiri Nasi Darurat Jogja semakin gencar dalam mengembangkan program-program yang dilakukan. Tidak hanya untuk mahasiswa dan anak kost saja, Nasi darurat Jogja juga merespon permintaan bantuan untuk masyarakat luas yang datang meminta bantuan. Seperti misalnya sebuah keluarga kecil di Jogja yang kekurangan, mereka menghubungi Nasi Darurat Jogja, maka tim Nasi Darurat Jogja bersedia untuk membantu dengan memberikan mereka bantuan logistik serta sembako seperti minyak, beras, susu anak, dan lain-lain. Nasi Darurat Jogja juga tidak hanya memberi bantuan pangan saja, disela program hariannya, mereka pernah memberikan bantuan kepada seseorang yang sakit menular dan membutuhkan bantuan untuk berobat serta kembali ke tempat tinggal asalnya. Pada situasi ini Nasi Darurat Jogja tidak dapat membantu banyak, tapi mereka tetap mencoba untuk membantu sebisa mereka dengan cara seperti menghubungi rumah sakit dan menghubungi Dinas Sosial Jogja agar dapat menghubungi Dinas Sosial asal pasien. Hal tersebut tidak hanya terjadi satu kali saja, namun beberapa kali telah dialami dan dilakukan oleh Nasi Darurat Jogja sehingga banyak sekali masyarakat asli maupun rantau di Jogja yang merasa terbantu.

Bantuan kemanusiaan sehari-hari yang dilakukan oleh Nasi darurat Jogja tidak hanya memberikan dampak yang bersifat sementara saja, karena Nasi Darurat Jogja memberikan bantuan yang dikategorikan darurat, bantuan tersebut sangat berarti dan selalu diingat oleh para penerima bantuan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa masih banyak masyarakat akar rumput serta individu yang ada di Indonesia, pada kasus ini terutama Yogyakarta, sangat membutuhkan bantuan walau hanya sekedar makanan, apalagi dengan jumlah penduduk di Yogyakarta yang kebanyakan adalah merupakan mahasiswa yang sedang berkuliah atau sedang merantau untuk bekerja. Tidak sedikit para penerima bantuan yang pernah menghubungi dan dibantu oleh Nasi Darurat Jogja kembali menghubungi Nasi darurat Jogja saat mereka sudah memiliki ekonomi yang stabil bahkan dapat dikatakan sukses. Ungkapan

terima kasih dan syukur tersebut merupakan bukti nyata bahwa gerakan bantuan kemanusiaan sehari-hari memiliki peran yang sangat penting dalam menjangkau area masyarakat lokal secara luas dan merata.



Gambar 2 & 3. Utas Nasi Darurat Jogja terkait bantuan yang telah diberikan dan penerima bantuan kembali menghubungi Nasi darurat Jogja

3.2. Citizen Aid sebagai Respons Kegagalan Sistemik Bantuan Formal

Munculnya *citizen aid* dalam tata kelola bantuan kemanusiaan merupakan respons langsung terhadap keterbatasan sistemik bantuan formal, yang kerap gagal menjangkau kelompok sasaran. Barnett mengidentifikasi dua ciri khas yang mendasari kegagalan ini: (1) fokus berlebihan pada akuntabilitas vertikal ke atas (*upward accountability*) kepada pendonor, bukan kepada penerima bantuan (*downward accountability*); dan (2) penerapan standar teknik keahlian yang kaku, sehingga mengesampingkan pengetahuan lokal dan menciptakan hierarki birokratis. Dominasi kepentingan pendonor ini tercermin dalam mekanisme pemantauan dan evaluasi (M&E), di mana indikator ketat dirancang lebih untuk memenuhi kebutuhan administratif donor (seperti justifikasi anggaran atau legitimasi politik) daripada menangkap dampak transformatif bagi masyarakat terdampak (Dietrich, 2015; Grigoriadis, 2013). Akibatnya, bantuan formal cenderung mengutamakan pencapaian target administratif – seperti laporan keuangan atau *output* fisik – ketimbang responsivitas dan efektivitas terhadap kebutuhan substantif penerima. Sebagai respons terhadap kegagalan sistemik ini, *citizen aid* hadir dengan pendekatan alternatif yang menitikberatkan pada

fleksibilitas, akuntabilitas horizontal, dan pemberdayaan lokal, sebagaimana diilustrasikan oleh Nasi Darurat Jogja.

Nasi Darurat Jogja, sebagai *citizen aid*, menawarkan kontras yang jelas dalam akuntabilitas dan operasionalisasi. Berbeda dengan model *upward accountability* bantuan formal, Nasi Darurat Jogja membangun mekanisme pelaporan berbasis kepercayaan personal dan transparansi digital. Melalui pemanfaatan media sosial (Twitter/X, Instagram, WhatsApp), Nasi Darurat Jogja tidak hanya menggalang dana dan menyebarkan informasi kegiatan, tetapi juga membagikan hasil nyata secara sederhana, menciptakan narasi publik yang langsung terverifikasi oleh masyarakat – sebuah karakter khas dari *citizen aid* (Richey, 2018; McKay dan Perez, 2019 dalam Schnable, 2024). Teknologi digital ini memungkinkan akuntabilitas langsung kepada publik (*downward accountability*), sehingga membangun dan mempertahankan legitimasi sosial (Fechter & Schwittay, 2019).

Sebagai *citizen aid*, Nasi Darurat Jogja juga menjawab kelambanan birokrasi bantuan formal dengan responsivitas tinggi. Hal ini terlihat dari mekanisme kerja Nasi Darurat Jogja yang sigap merespons aduan masyarakat yang mengalami kondisi kritis. Berdasarkan wawancara dengan pendiri gerakan, umumnya aduan yang diterima berasal dari kelompok rentan yang kesulitan mengakses makanan. Setelah menerima aduan, tim Nasi Darurat Jogja segera memverifikasi alamat penerima bantuan dan memetakan distribusi berdasarkan wilayah untuk memastikan efisiensi penyaluran. Adapun metode distribusi bantuan pangan dirancang secara fleksibel, mencakup tiga pendekatan: (1) pengantaran langsung ke lokasi penerima, (2) penggunaan layanan pesan antar makanan *online* (seperti GoFood dan sejenisnya), dan (3) transfer dana tunai supaya penerima bantuan dapat membeli makanan sesuai kebutuhan, misalnya dengan membeli kebutuhan logistik untuk memasak atau makanan dalam bentuk siap saji (Stefano, 2025). Kombinasi strategi ini tidak hanya mempercepat respons, tetapi juga menyesuaikan dengan kondisi spesifik penerima bantuan.

Lebih dari sekadar bantuan pangan, Nasi Darurat Jogja memperluas responnya terhadap masalah sosial mendesak yang diadukan masyarakat melalui media sosial. Salah satu cerita dari pendiri gerakan adalah tentang seorang warga yang secara tiba-tiba mendatangi *basecamp* gerakan ini dalam kondisi sakit. Tim Nasi Darurat Jogja segera merespons dengan memberikan pertolongan darurat dan membawa individu tersebut ke fasilitas kesehatan terdekat untuk pemeriksaan medis. Hasil diagnosis menunjukkan bahwa kondisi kesehatannya cukup kritis, sehingga diperlukan pemulangan ke daerah asal. Melalui koordinasi dengan dinas sosial setempat, Nasi Darurat Jogja memfasilitasi proses pemulangan secara aman. Langkah ini tidak hanya mencerminkan responsivitas tinggi, tetapi juga menandakan potensi kolaborasi efektif antara inisiatif warga dan otoritas lokal. Adapun bentuk bantuan yang telah diberikan Nasi Darurat Jogja selain bantuan pangan, mulai dari bantuan sembako dan kebutuhan mendesak, seperti fasilitas kendaraan (sepeda dan tiket transportasi umum), serta fasilitas kesehatan (obat-obatan dan psikolog) (Stefano, 2025).

Fleksibilitas operasional Nasi Darurat Jogja secara tegas menantang rigiditas bantuan formal, sebagaimana ditegaskan pendirinya dalam wawancara: “Pemerintah sudah hadir,

namun sosialisasinya yang belum mendalam, belum sampai ke masyarakat” (Stefano, 2025). Pernyataan ini menyoroti akar masalah birokrasi formal: sosialisasi yang tidak efektif akibat prosedur administratif kompleks yang memperlambat respons – sebagaimana ciri khas yang melekat pada bantuan formal (Dietrich, 2015; Picard, Groelsema, & Buss, 2015). Posisi Nasi Darurat Jogja di sini ialah bukan untuk menggantikan, melainkan menyempurnakan celah sistemik bantuan formal dengan mengutamakan kedekatan dan kecepatan.

Kritik Nasi Darurat Jogja terhadap formalitas sistemik selaras dengan analisis Barnett tentang dominasi otoritas keahlian (*expert authority*) pasca-Perang Dingin, yang meminggirkan otoritas moral (*moral authority*) atau yang dapat dikenal sebagai relawan akar rumput akibat profesionalisasi berlebihan (Barnett, 2013). Nasi Darurat Jogja secara konkret merespons marginalisasi ini dengan membangun otoritas berbasis solidaritas warga. Gerakan ini mengandalkan relawan tanpa mensyaratkan sertifikasi keahlian formal, membuka partisipasi seluas-luasnya, sekaligus mengakui kontribusi mereka – bahkan dengan memberikan upah sebagaimana diungkapkan pendirinya – karena kerja distribusi (misalnya, menyalurkan rata-rata 30 paket bantuan per hari) dinilai berat dan layak dihargai secara materi (Stefano, 2025). Praktik ini menegaskan kembali peran otoritas moral dalam tata kelola kemanusiaan dan menolak anggapan bahwa kompleksitas krisis hanya bisa diatasi oleh “ahli” bersertifikasi. Dengan demikian, melalui karakter skala kecil, pendanaan mandiri, dan orientasi pada kelompok rentan (Fechter & Schwittay, 2019; Schnable, 2024), Nasi Darurat Jogja merepresentasikan esensi *citizen aid* sebagai koreksi atas kegagalan sistemik bantuan formal sekaligus penegasan kapasitas aktor lokal.

3.3. Disrupsi dan Negosiasi Terhadap Norma Profesionalisme dan Akuntabilitas Humanitarian

Nasi Darurat Jogja secara fundamental mendisrupsi dan menegosiasikan norma profesionalisme dan akuntabilitas humanitarian yang birokratisasi, distandardisasi, dan dilembagakan (Richey, 2018). Pada awalnya, Nasi Darurat Jogja bergerak di arah berlawanan sebagai *counter-professional humanitarianism* yang secara sengaja menolak struktur formal. Pendiri gerakan, secara eksplisit menyatakan enggan membentuk badan hukum untuk menghindari kerumitan administratif dan menjaga fleksibilitas gerakan (Stefano, 2025). Gerakan ini beroperasi sebagai jaringan terbuka tanpa hierarki kaku, tanpa mekanisme seleksi penerima bantuan yang ketat, serta tanpa sistem pelaporan sistematis yang mengikat. Namun, ambivalensi muncul seiring pertumbuhan skala dan ekspektasi publik, ditunjukkan dengan rencana membuka rekening khusus, penyusunan laporan donasi, dan pertimbangan keterikatan legal – sebagaimana terungkap dalam wawancara (Stefano, 2025). Hal ini mengilustrasikan indikasi pragmatis Nasi Darurat Jogja menuju *semi-profesionalisasi*. Pergulatan ini merefleksikan ketegangan antara idealisme kemanusiaan berbasis afeksi dan tuntutan akuntabilitas administratif yang tak terelakkan. Pada akhirnya, Nasi Darurat Jogja berusaha mempertahankan otonomi jaringan komunitas sembari mengakomodasi

administratif minimal sebagai “kompromi” dengan sistem, demi keberlanjutan gerakan dan program bantuan.

Disrupsi dan negosiasi Nasi Darurat Jogja terhadap norma profesionalisme humanitarian juga muncul sebagai respons atas tantangan operasional khas *citizen aid*. Seperti diungkapkan pendirinya dalam wawancara, gerakan ini menghadapi kesulitan sumber daya anggaran dan kelelahan pengelola (Stefano, 2025), faktor yang menurut Schnable sering membatasi usia inisiatif berbasis relawan, bahkan menjadi alasan umum berhentinya gerakan *citizen aid* (Schnable, 2024). Menyikapi kondisi rentan ini, Nasi Darurat Jogja merancang strategi *marketization*: pendirian warung makan mengadopsi *cross-subsidization*, yakni dengan menjual makanan ke publik sekaligus membagikannya secara gratis kepada yang membutuhkan. Integrasi logika pasar ini merupakan bentuk negosiasi praktis – sebuah upaya menjaga keberlanjutan tanpa mengorbankan semangat tolong-menolong sekaligus mengatasi ketergantungan pada donasi dan kelelahan relawan.

Model subsidi silang ini mengkonkretkan analisis Richey tentang kapitalisasi “kebaikan” dalam aktivitas mikro warga, secara langsung menantang dikotomi kaku antara altruisme murni dan komersialisasi dalam ruang kemanusiaan (Richey, 2018). Lebih jauh, pendiri menegaskan bahwa strategi ini – yang lahir dari diskusi terbuka menyikapi endapan dana donatur di platform X – bertujuan mentransformasi *marketization* menjadi alat pemberdayaan komunitas, menggeser orientasi dari keuntungan pribadi menuju tanggung jawab moral untuk menyalurkan amanah dana masyarakat secara berkelanjutan (Stefano, 2025). Dengan demikian, negosiasi nilai melalui *marketization* tidak hanya menjawab kerentanan operasional *citizen aid*, tetapi juga secara aktif mendisrupsi logika bantuan konvensional dengan menggunakan pendekatan unik yang inovatif.

Selain melalui profesionalisasi dan marketisasi, peran kunci mediatisasi digital – terutama platform X – memperkuat disrupsi ini. Nasi Darurat Jogja lahir dan tumbuh di X, tempat narasi afektif pendiri (kesulitan biaya, pengalaman pribadi, momen memberi) diartikulasikan untuk mobilisasi donasi, dokumentasi aksi, dan legitimasi moral. Akuntabilitas dibangun bukan melalui laporan formal, melainkan visualisasi langsung (foto pembagian bantuan pangan, cerita penerima, utas menyentuh) yang menggantikan fungsi struktural lembaga tradisional (Richey, 2018), sekalipun dalam bentuk yang personal dan repetitif. Pendekatan ini menggantikan logika pertanggungjawaban teknis-profesional (*upward accountability*) dengan model *downward accountability* berbasis kepercayaan (*trust based*).

Pada esensinya, Nasi Darurat Jogja mewujudkan *everyday humanitarianism* Richey, memobilisasi sumber daya melalui modal sosial, afeksi, dan infrastruktur digital – bukan desain institusional. Kepekaan sosial dikonversi menjadi tindakan nyata lewat relasi langsung dan respons cepat terhadap kebutuhan mendesak masyarakat, dikelola secara adaptif dalam jaringan sosial yang dinamis. Dengan demikian, Nasi Darurat Jogja bukan sekadar pemberi bantuan, melainkan bentuk solidaritas akar rumput yang secara aktif mendisrupsi norma profesionalisme humanitarian melalui fleksibilitas operasional, integrasi logika pasar, dan

akuntabilitas berbasis afeksi digital, seraya terus bernegosiasi dengan tuntutan formal seiring skalanya yang membesar.

4. KESIMPULAN

Studi kasus Nasi Darurat Jogja menyoroti kemunculan "humanitarianisme afektif digital" sebagai bentuk "*citizen aid*" sehari-hari di Global South, yang berfungsi sebagai respons inovatif terhadap keterbatasan bantuan formal. Temuan kunci menunjukkan bahwa gerakan ini berhasil memobilisasi solidaritas melalui narasi empatik dan dokumentasi *real-time* di media sosial, menciptakan "verifikasi moral digital" yang mendorong donasi dan partisipasi masyarakat. Nasi Darurat Jogja juga muncul sebagai koreksi terhadap rigiditas sistem bantuan formal dengan menawarkan akuntabilitas horizontal, respons cepat dalam 24 jam, dan fleksibilitas operasional, yang memungkinkannya menjangkau kelompok rentan yang sering terabaikan oleh birokrasi.

Selain itu, gerakan ini mendisrupsi norma profesionalisme konvensional dalam humanitarianisme. Meskipun menolak struktur formal seperti badan hukum, Nasi Darurat Jogja mengadopsi "semi-profesionalisasi" (misalnya, rekening khusus dan laporan donasi) untuk keberlanjutan. Gerakan ini juga mengintegrasikan logika pasar melalui "warung makan subsidi silang" sebagai strategi keberlanjutan tanpa mengorbankan nilai solidaritas, serta membangun legitimasi berbasis kepercayaan melalui dokumentasi visual di media sosial. Secara keseluruhan, Nasi Darurat Jogja membuktikan kapasitas aktor lokal dalam menciptakan alternatif yang responsif terhadap ketimpangan sehari-hari dan secara aktif mengkritik sistem bantuan formal yang kurang kontekstual dan adaptif. Studi ini berkontribusi pada literatur dengan memperluas pemahaman tentang "*citizen aid*" di luar konteks Global North dan situasi darurat besar, menyoroti pentingnya afeksi, media digital, dan praktik sehari-hari dalam membentuk solidaritas di komunitas akar rumput.

DAFTAR PUSTAKA

- Babbie, E. (2008). *The Basics of Social Research* (Fourth). Belmont: Thomson Higher Education.
- Barnett, M. (2011). *Empire of Humanity: A History of Humanitarianism*. Cornell University Press.
- Barnett, M. N. (2013). Humanitarian governance. *Annual Review of Political Science*, 16, 379–398. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-012512-083711>
- Brković, Č. (2016). *Managing Ambiguity: How Clientelism, Citizenship and Power Shape Personhood in Bosnia and Herzegovina*. Berghahn Books.
- Dietrich, S. (2015). Donor Political Economies and the Pursuit of Aid Effectiveness. *International Organization*, 70(1), 65–102. <https://doi.org/10.1017/S0020818315000302>
- Fassin, D. (2012). *Humanitarian Reason: A Moral History of the Present*. University of California Press.

- Fechter, A.-M., & Schwittay, A. (2019). Citizen aid: grassroots interventions in development and humanitarianism. *Third World Quarterly*, 40(10), 1769–1780. <https://doi.org/10.1080/01436597.2019.1656062>
- Fechter, A.-M., & Schwittay, A. (2019). Citizen aid and everyday humanitarianism: Rethinking care and regulation in response to displacement. *Journal of Global Ethics*, 15(3), 277–294. <https://doi.org/10.1080/17449626.2019.1684337>
- Fylkesnes, J. (2019). Motivations behind citizen aid: Norwegian initiatives in The Gambia. *Third World Quarterly*, 40(10), 1784–1802. <https://doi.org/10.1080/01436597.2019.1656061>
- Grigoriadis, T. N. (2013). AID EFFECTIVENESS AND DONOR PREFERENCES: EUROPEAN AID SYSTEMS IN THE FORMER SOVIET UNION, 1992–2007. *Journal of International Development*, 25(1), 45–66. <https://doi.org/10.1002/jid.1800>
- Haaland, H., & Wallevik, H. (2019). Beyond crisis management? The role of Citizen Initiatives for Global Solidarity in humanitarian aid: the case of Lesvos. *Third World Quarterly*, 40(10), 1869–1883. <https://doi.org/10.1080/01436597.2019.1656060>
- Lahiri, S. C. (2023). Citizen’s groups and grassroots humanitarianism. In T. Korf, A. Denskus & H. F. H. Brankamp (Eds.), *Handbook on Humanitarianism and Inequality*. Edward Elgar Publishing.
- McKay, D., & Perez, P. (2019). Citizen aid, social media and brokerage after disaster. *Third World Quarterly*, 40(10), 1831–1849. <https://doi.org/10.1080/01436597.2019.1656064>
- Meydan, C. H., & Akkaş, H. (2024). The Role of Triangulation in Qualitative Research. In *Principles of Conducting Qualitative Research in Multicultural Settings* (pp. 101–132). <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-3306-8.ch006>
- Nightingale, A. J. (2019). Triangulation. *International Encyclopedia of Human Geography*, Second Edition, 13, 477–480. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102295-5.10437-8>
- Picard, L. A., Groelsema, R., & Buss, T. F. (2015). *Foreign Aid and Foreign Policy: Lessons for the Next Half-century* (1st Editio). New York: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315704289>
- Richey, L. A. (2018). Conceptualizing “Everyday humanitarianism”: Ethics, affects, and practices of contemporary global helping. *New Political Science*, 40(4), 625–639. <https://doi.org/10.1080/07393148.2018.1528538>
- Schnable, A. (2024). Citizen Aid. In R. M. Desai, S. Devarajan, & J. L. Tobin (Eds.), *Handbook of Aid and Development* (pp. 275–287). Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781800886810>
- Stefano. (2025). Wawancara dengan Pendiri Nasi Darurat Jogja. Yogyakarta.
- Richey, L. A. (2018). Conceptualizing “everyday humanitarianism”: Ethics, affects, and practices of contemporary global helping. *New Political Science*, 40(4), 625–639. <https://doi.org/10.1080/07393148.2018.1528556>
- Slim, H. (2015). *Humanitarian Ethics: A Guide to the Morality of Aid in War and Disaster*. Oxford University Press.
- Ticktin, M. (2014). Transnational humanitarianism. *Annual Review of Anthropology*, 43, 273–289. <https://doi.org/10.1146/annurev-anthro-102313-030403>
- Wall, I., & Chroust, P. (2020). *Humanitarian Accountability Report 2020: Are we making aid work for people in crisis?* Geneva: CHS Alliance. <https://www.chsalliance.org/resources/chs-humanitarian-accountability-report-2020/>